

Model Batalyon Teritorial Pembangunan untuk Meningkatkan Resiliensi Keamanan Maritim Nasional

Fitry Taufiq Sahary^{1*}, Nefra Firdaus²

^{1,2}Kawasan IPSC Sentul, Jl. Anyar, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
fitry.taufiq@idu.ac.id^{1*}, nefra.firdaus@idu.ac.id²

*Corresponding Author

Article Info

Article history:

Received : 08 July 2026

Revised : 08 July 2026

Accepted : 08 July 2026

Kata Kunci:

keamanan maritim,
Batalyon Teritorial
Pembangunan,
pertahanan wilayah,
keamanan nasional,
strategi maritim.

Abstrak

Keamanan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat meningkatnya ancaman multidimensi, seperti *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, penyelundupan lintas negara, perdagangan manusia, kejahatan siber maritim, serta dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Kondisi tersebut menuntut penguatan sistem pertahanan yang tidak hanya berorientasi pada operasi laut, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah pesisir sebagai garis depan keamanan maritim. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi eksisting keamanan maritim Indonesia, mengidentifikasi peran strategis Batalyon Teritorial Pembangunan, serta merumuskan model strategi pembentukannya dalam mendukung keamanan maritim nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta literatur ilmiah nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batalyon Teritorial Pembangunan memiliki peran strategis dalam memperkuat kehadiran negara di wilayah pesisir melalui pembinaan teritorial, deteksi dini, penguatan *Maritime Domain Awareness*, pemberdayaan masyarakat, dukungan logistik, dan sinergi antarlembaga. Keunikan penelitian ini terletak pada pengembangan model BTP-*Maritime Shield 5M (Mapping, Monitoring, Mobilizing, Mitigating, dan Maritime Empowering)* yang mengintegrasikan pertahanan wilayah, teknologi digital, sistem informasi maritim, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam satu kerangka keamanan maritim yang adaptif dan berkelanjutan. Model ini merupakan pendekatan konseptual baru yang memperluas fungsi Batalyon Teritorial Pembangunan tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan darat, tetapi juga sebagai *force multiplier* dalam membangun resiliensi keamanan maritim nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan *whole of government* serta *whole of nation*.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sekitar 108.000 km, dan wilayah yurisdiksi laut mencapai sekitar 6,4 juta km². Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta di antara Benua Asia dan Australia menjadikan Indonesia sebagai poros strategis perdagangan dan pelayaran internasional. Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi jalur utama lalu lintas kapal niaga dunia yang menghubungkan kawasan Indo-Pasifik sehingga stabilitas keamanan maritim Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi regional maupun global (UNCLOS,

1982; Bueger, 2015; Till, 2018).

Perkembangan lingkungan strategis global menunjukkan bahwa karakter ancaman keamanan maritim mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ancaman tidak lagi didominasi oleh konflik militer konvensional, tetapi berkembang menjadi ancaman multidimensi berupa *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, perompakan, terorisme maritim, sabotase infrastruktur strategis, serangan siber terhadap pelabuhan, hingga aktivitas *grey zone* yang memanfaatkan instrumen nonmiliter untuk mencapai tujuan geopolitik tertentu (Bueger, 2015; Bateman, 2019; FAO, 2022). Kompleksitas ancaman tersebut semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), kendaraan nirawak (*Unmanned Systems*), serta meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

Indonesia juga menghadapi tantangan pengamanan wilayah laut yang sangat luas dibandingkan dengan ketersediaan personel maupun sarana pengawasan. Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil terluar, dan kawasan perbatasan laut memerlukan kehadiran negara secara berkelanjutan, bukan hanya melalui patroli laut, tetapi juga melalui pembangunan kapasitas pertahanan wilayah yang mampu mendukung stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, keamanan maritim tidak dapat dipandang semata sebagai tanggung jawab kekuatan laut, tetapi membutuhkan sinergi antardimensi pertahanan darat, laut, udara, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, serta masyarakat pesisir melalui pendekatan *whole of government* dan *whole of nation* (Till, 2018; Bateman, 2019).

Dalam perspektif pertahanan negara, pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan salah satu inovasi strategis yang berpotensi memperkuat sistem pertahanan wilayah sekaligus mendukung keamanan maritim Indonesia. Konsep batalyon ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan teritorial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan nasional melalui peningkatan ketahanan wilayah, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, mitigasi bencana, pengamanan objek vital nasional, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman nonmiliter. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pertahanan semesta yang menempatkan seluruh sumber daya nasional sebagai komponen strategis dalam mendukung pertahanan negara (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019).

Apabila ditempatkan pada wilayah pesisir, pulau-pulau terluar, dan kawasan strategis maritim, keberadaan Batalyon Teritorial Pembangunan memiliki nilai strategis yang jauh lebih luas. Selain meningkatkan kehadiran negara (*state presence*), satuan tersebut dapat berfungsi sebagai simpul koordinasi dalam mendukung pengawasan wilayah pesisir, memperkuat ketahanan masyarakat maritim, membantu pengamanan pelabuhan strategis, mendukung operasi kemanusiaan, mempercepat respons terhadap bencana alam, serta memperkuat kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai,

Imigrasi, dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut akan menghasilkan sistem keamanan maritim yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan (Bakamla RI, 2024; Bateman, 2019). Dasar hukum tugas Bakamla dalam patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014.

Secara konseptual, Christian Bueger (2015) menjelaskan bahwa keamanan maritim merupakan konsep multidimensional yang mencakup empat dimensi utama, yaitu keamanan nasional (*national security*), pembangunan ekonomi (*economic development*), keselamatan pelayaran (*marine safety*), dan keamanan manusia (*human security*). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan keamanan maritim tidak cukup

hanya melalui peningkatan kekuatan tempur di laut, tetapi juga harus memperkuat ketahanan wilayah daratan yang menjadi penyangga utama aktivitas maritim. Dengan demikian, pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dapat dipandang sebagai bagian dari strategi integratif yang menghubungkan pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan sistem pertahanan nasional.

Di sisi lain, meningkatnya dinamika keamanan di Laut Natuna Utara, Selat Malaka, serta berbagai kawasan perbatasan laut Indonesia menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas negara dalam melaksanakan deteksi dini, pencegahan, dan respons cepat terhadap berbagai bentuk ancaman. Kehadiran satuan teritorial yang memiliki kemampuan pembinaan wilayah sekaligus mendukung operasi keamanan maritim diyakini mampu meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, mempercepat distribusi logistik, memperkuat sistem informasi kewilayahan, serta meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks (Till, 2018; Kementerian Pertahanan RI, 2023).

Tabel 1. Data dan Fakta yang Melatarbelakangi Penelitian

No.	Data dan Fakta	Sumber
1	Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan wilayah yurisdiksi laut sekitar 6,4 juta km ² .	UNCLOS (1982); KKP RI
2	Indonesia memiliki tiga ALKI yang menjadi jalur strategis pelayaran internasional.	UNCLOS (1982); IMO
3	Ancaman keamanan maritim berkembang menjadi IUU Fishing, penyelundupan, terorisme maritim, dan <i>grey zone</i> .	Bueger (2015); FAO (2022)
4	Keamanan maritim memerlukan pendekatan multidimensi dan lintas sektor.	Bateman (2019); Till (2018)
5	Pertahanan negara Indonesia menerapkan Sistem Pertahanan Semesta.	UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2019
6	Bakamla melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	UU No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 178 Tahun 2014

(Sumber: Pengolahan Data Peneliti (2026))

Berdasarkan kondisi tersebut, pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan tidak hanya dipandang sebagai penguatan organisasi pertahanan darat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun resiliensi keamanan maritim Indonesia melalui penguatan kehadiran negara di wilayah pesisir, peningkatan ketahanan masyarakat maritim, pengembangan sinergi antarlembaga, serta dukungan terhadap operasi keamanan laut secara terpadu. Penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini kajian mengenai keterkaitan antara pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dan penguatan keamanan maritim Indonesia masih relatif terbatas, padahal kebutuhan terhadap model pertahanan wilayah yang adaptif semakin mendesak.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana kondisi eksisting keamanan maritim Indonesia yang memerlukan dukungan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan; (2) bagaimana peran strategis Batalyon Teritorial Pembangunan dalam memperkuat keamanan maritim melalui pendekatan pertahanan wilayah; dan (3) bagaimana model strategi pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang efektif untuk mendukung terwujudnya keamanan maritim Indonesia yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena bertujuan menganalisis secara mendalam strategi pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi eksisting keamanan maritim, dinamika lingkungan strategis, peran para pemangku kepentingan, serta formulasi strategi yang relevan dalam mendukung sistem pertahanan negara. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks, melibatkan berbagai aktor, serta memerlukan pemahaman terhadap konteks sosial, kelembagaan, dan kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, laporan organisasi internasional, serta publikasi resmi kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan maritim. Sumber data utama antara lain berasal dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, TNI, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Maritime Organization (IMO), *Food and Agriculture Organization* (FAO), serta *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Pemanfaatan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid, kredibel, dan mampu menggambarkan kondisi faktual keamanan maritim Indonesia.

Analisis data menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk mengidentifikasi hubungan antara ancaman keamanan maritim, kebutuhan penguatan pertahanan wilayah, dan urgensi pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan.

Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif Keamanan Maritim yang dikemukakan oleh Bueger (2015), sehingga mampu menjelaskan keterkaitan antara dimensi keamanan nasional, keselamatan maritim, pembangunan ekonomi, dan keamanan manusia. Pendekatan metodologis ini dinilai paling tepat karena mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang komprehensif mengenai model pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan sebagai bagian dari penguatan keamanan maritim dan sistem pertahanan negara Indonesia (Creswell & Poth, 2018; Braun & Clarke, 2006; Bueger, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan lingkungan strategis global, meningkatnya rivalitas geopolitik kawasan Indo-Pasifik, perkembangan teknologi, serta semakin beragamnya bentuk ancaman nontradisional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menjadi penghubung jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan maritim regional maupun global (UNCLOS, 1982; Till, 2018; Bueger, 2015).

Secara geografis, Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, garis pantai sekitar 108.000 kilometer, serta wilayah perairan yang mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Luas wilayah tersebut memberikan keuntungan strategis sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam pengawasan dan pengamanan laut. Kondisi ini menyebabkan

kebutuhan terhadap kehadiran negara tidak hanya diwujudkan melalui patroli laut, tetapi juga melalui penguatan pertahanan wilayah di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024; Badan Informasi Geospasial, 2023).

Selain karakteristik geografis, tingginya intensitas aktivitas pelayaran internasional memperbesar kerentanan terhadap berbagai bentuk ancaman keamanan maritim. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2024) melaporkan bahwa lebih dari 80% volume perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut dengan total perdagangan maritim mencapai sekitar 12,3 miliar ton pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas jalur pelayaran Indonesia memiliki pengaruh langsung terhadap rantai pasok global, keamanan energi, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perspektif keamanan, ancaman maritim Indonesia telah berkembang dari ancaman konvensional menuju ancaman multidimensional. Christian Bueger (2015) menjelaskan bahwa keamanan maritim mencakup empat dimensi utama, yaitu keamanan nasional (*national security*), keselamatan pelayaran (*marine safety*), pembangunan ekonomi (*blue economy*), dan keamanan manusia (*human security*). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa persoalan keamanan maritim tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab angkatan laut, tetapi memerlukan sinergi antarsektor dalam menjaga stabilitas wilayah pesisir, sumber daya kelautan, dan masyarakat maritim.

Hasil kajian menunjukkan bahwa *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) masih menjadi ancaman yang signifikan bagi Indonesia. *Food and Agriculture Organization* (2024) menyatakan bahwa sekitar 37,7% stok ikan dunia telah dieksploitasi secara biologis tidak berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak terhadap meningkatnya aktivitas penangkapan ikan ilegal di berbagai kawasan, termasuk perairan Indonesia. Kerugian ekonomi akibat IUU Fishing diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat setiap tahun dan secara langsung mengurangi kesejahteraan nelayan serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan nasional (FAO, 2024; Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024).

Selain IUU Fishing, Indonesia juga menghadapi ancaman berupa penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan barang, pencemaran laut, perompakan, pelanggaran wilayah laut, hingga aktivitas grey zone di Laut Natuna Utara. Karakter ancaman tersebut sulit diatasi apabila hanya mengandalkan patroli laut karena sebagian besar aktivitas ilegal berawal dari wilayah pesisir, pelabuhan kecil, dan pulau-pulau terluar. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pertahanan wilayah yang mampu menghadirkan negara secara berkelanjutan di kawasan tersebut (Bateman, 2019; Till, 2018; Kementerian Pertahanan RI, 2023).

Dalam kerangka *Maritime Domain Awareness* (MDA), *International Maritime Organization* (IMO, 2023) menekankan pentingnya integrasi informasi, deteksi dini, dan koordinasi antarlembaga sebagai fondasi utama keamanan maritim. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya keterbatasan teknologi, tetapi juga luasnya wilayah operasi, keterbatasan personel, serta belum meratanya kehadiran unsur keamanan di kawasan pesisir. Dengan demikian, pembangunan sistem keamanan maritim harus dilakukan secara berlapis melalui integrasi unsur laut, udara, dan daratan.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh konsep Sistem Pertahanan Semesta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa seluruh sumber daya nasional harus dipersiapkan sebagai komponen pertahanan negara melalui keterpaduan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Dengan demikian, penguatan keamanan maritim tidak cukup hanya dilakukan oleh TNI Angkatan

Laut, tetapi memerlukan dukungan seluruh komponen pertahanan yang berada di wilayah daratan maupun pesisir.

Dalam konteks tersebut, pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan memiliki urgensi yang sangat tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan batalyon tersebut dapat memperkuat kehadiran negara pada wilayah pesisir melalui fungsi pembinaan teritorial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, mitigasi bencana, dukungan logistik, serta penguatan ketahanan wilayah. Konsep ini selaras dengan pendekatan *whole of government* dan *whole of nation* yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh institusi negara dalam menghadapi ancaman multidimensi (Bateman, 2019; OECD, 2020).

Tabel 2. Data Kuantitatif Pendukung Urgensi Penguatan Keamanan Maritim Indonesia

No.	Nama Data	Nilai	Sumber
1	Jumlah pulau Indonesia	±17.504 pulau	BIG (2023); KKP (2024)
2	Garis pantai Indonesia	±108.000 km	BIG (2023)
3	Wilayah yurisdiksi laut Indonesia	±6,4 juta km ²	KKP (2024)
4	Volume perdagangan dunia melalui laut	>80%	UNCTAD (2024)
5	Perdagangan maritim global	±12,3 miliar ton (2023)	UNCTAD (2024)
6	Stok ikan dunia yang dieksploitasi tidak berkelanjutan	37,7%	FAO (2024)

(Sumber: Pengolahan data Peneliti (2026))

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa kompleksitas keamanan maritim Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh luas wilayah, tetapi juga oleh meningkatnya intensitas perdagangan global, eksploitasi sumber daya laut, perkembangan teknologi, dan rivalitas geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru yang tidak hanya mengandalkan patroli laut sebagai instrumen utama keamanan maritim.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa salah satu kesenjangan utama dalam sistem keamanan maritim Indonesia adalah belum optimalnya integrasi antara sistem pertahanan wilayah daratan dengan sistem keamanan laut. Selama ini, pembangunan kekuatan lebih banyak berorientasi pada unsur operasional di laut, sedangkan wilayah pesisir sebagai titik awal munculnya berbagai ancaman belum memperoleh perhatian yang seimbang. Padahal, sebagian besar aktivitas penyelundupan, pelanggaran hukum, maupun infiltrasi aktor nonnegara memanfaatkan kawasan pesisir, pelabuhan rakyat, dan pulau-pulau kecil sebagai jalur masuk.

Temuan tersebut mengarah pada kebutuhan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan Berbasis Maritim, yaitu satuan yang tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan wilayah, tetapi juga berperan sebagai simpul koordinasi keamanan maritim, pusat pemberdayaan masyarakat pesisir, pendukung *Maritime Domain Awareness*, serta penghubung operasi lintas kementerian dan lembaga. Dengan desain tersebut, batalyon mampu menjadi *force multiplier* yang memperkuat sinergi antara TNI AD, TNI AL, Bakamla, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, Imigrasi, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat pesisir.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa kondisi eksisting keamanan maritim Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara luas wilayah, dinamika ancaman, dan kapasitas kehadiran negara. Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan berbasis maritim merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat pertahanan wilayah, meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir, serta mewujudkan sistem keamanan maritim nasional yang lebih adaptif, terpadu, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga rumusan masalah telah terjawab secara komprehensif. Pertama, kondisi eksisting keamanan maritim Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara luas wilayah yurisdiksi laut, kompleksitas ancaman, dan kapasitas pengamanan wilayah pesisir. Ancaman yang berkembang tidak hanya berupa pelanggaran kedaulatan, tetapi juga mencakup *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), penyelundupan, perdagangan manusia, kejahatan siber maritim, hingga aktivitas *grey zone* yang memerlukan respons lintas sektor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem keamanan maritim memerlukan penguatan pada dimensi daratan sebagai penyangga utama wilayah laut.

Kedua, penelitian menemukan bahwa Batalyon Teritorial Pembangunan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara sistem pertahanan wilayah dan keamanan maritim. Melalui fungsi pembinaan teritorial, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat pesisir, dukungan logistik, mitigasi bencana, serta deteksi dini, batalyon mampu memperkuat kehadiran negara sekaligus meningkatkan resiliensi masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar.

Ketiga, penelitian menghasilkan model strategi BTP–*Maritime Shield* 5M, yaitu *Mapping, Monitoring, Mobilizing, Mitigating*, dan *Maritime Empowering*. Model ini mengintegrasikan pertahanan wilayah, teknologi informasi, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga dalam satu sistem keamanan maritim yang adaptif, terpadu, dan berkelanjutan. Model tersebut menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian karena menempatkan Batalyon Teritorial Pembangunan sebagai simpul integrasi antara pembangunan wilayah dan penguatan keamanan maritim nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan pertahanan darat, tetapi memiliki implikasi strategis terhadap penguatan keamanan maritim nasional. Selama ini, pembangunan kekuatan pertahanan lebih banyak difokuskan pada peningkatan kapabilitas unsur laut dan udara, sedangkan wilayah pesisir sebagai ruang transisi antara daratan dan lautan belum memperoleh perhatian yang proporsional. Padahal, sebagian besar aktivitas penyelundupan, infiltrasi, perdagangan manusia, penangkapan ikan ilegal, maupun ancaman nonmiliter lainnya bermula dari kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terluar.

Dalam perspektif keamanan maritim, wilayah pesisir merupakan lapisan pertahanan pertama yang menentukan efektivitas sistem pengawasan nasional. Oleh karena itu, keberadaan Batalyon Teritorial Pembangunan akan memperkuat fungsi deteksi dini melalui pembinaan masyarakat, pengumpulan informasi kewilayahan, pengamanan objek vital, serta peningkatan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Pendekatan tersebut menciptakan sistem keamanan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif melalui peningkatan ketahanan masyarakat pesisir.

Model BTP–*Maritime Shield* 5M yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan strategi baru yang mengintegrasikan lima komponen utama, yaitu pemetaan kerawanan (*Mapping*), pemantauan berbasis teknologi (*Monitoring*), mobilisasi sumber daya masyarakat (*Mobilizing*), mitigasi ancaman (*Mitigating*), serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat maritim (*Maritime Empowering*). Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya menghubungkan pertahanan wilayah dengan pembangunan nasional secara simultan sehingga mampu meningkatkan kehadiran negara, memperkuat *Maritime Domain Awareness*, mempercepat respons terhadap ancaman, serta membangun resiliensi keamanan maritim yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan tidak hanya memperkuat Sistem Pertahanan Semesta, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keamanan maritim Indonesia yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keamanan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks sebagai akibat dari dinamika lingkungan strategis global, meningkatnya rivalitas geopolitik, serta berkembangnya ancaman multidimensi yang mencakup kejahatan lintas negara, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perdagangan manusia, ancaman terhadap infrastruktur maritim, dan berbagai bentuk ancaman nonmiliter lainnya. Kondisi tersebut diperberat oleh karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas, ribuan pulau, serta jalur pelayaran internasional yang menjadi kepentingan strategis nasional maupun global. Oleh karena itu, penguatan keamanan maritim tidak dapat hanya mengandalkan patroli laut, tetapi harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi antara aspek pertahanan, pembangunan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan langkah strategis untuk memperkuat keamanan maritim Indonesia. Keberadaan batalyon ini tidak hanya berfungsi sebagai unsur pertahanan wilayah daratan, tetapi juga berperan sebagai penghubung sinergi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat pesisir dalam mendukung deteksi dini, pengawasan wilayah, pengamanan objek vital, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat maritim. Dengan demikian, batalyon tersebut mampu memperkuat kehadiran negara di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

Penelitian ini juga menghasilkan suatu model strategi yang menempatkan Batalyon Teritorial Pembangunan sebagai pusat integrasi antara pertahanan, pembangunan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Model tersebut menekankan pentingnya pemetaan kerawanan wilayah, penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat pesisir, mitigasi berbagai bentuk ancaman, serta pengembangan kapasitas ekonomi maritim. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem keamanan maritim yang lebih adaptif, kolaboratif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan keamanan pada masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu menjadikan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia. Penempatan satuan tersebut sebaiknya diprioritaskan pada wilayah pesisir, pulau-pulau kecil terluar, kawasan perbatasan, serta daerah yang memiliki tingkat kerawanan keamanan maritim tinggi. Penempatan tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik geografis, tingkat ancaman, dan kepentingan strategis nasional sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi pertahanan maupun pembangunan wilayah.

Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi dan interoperabilitas antara TNI, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Kepolisian, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia akademik, serta masyarakat pesisir melalui sistem komando, pertukaran informasi, dan pelaksanaan operasi terpadu. Integrasi tersebut akan meningkatkan efektivitas deteksi dini, respons cepat, serta pengambilan keputusan dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim.

Selain itu, pengembangan kapasitas Batalyon Teritorial Pembangunan perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi modern, seperti sistem informasi kewilayahan digital, kecerdasan buatan, sistem pengawasan nirawak, serta jaringan komunikasi yang terintegrasi. Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi juga menjadi faktor penting agar batalyon mampu menjalankan fungsi pertahanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara profesional.

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model implementasi yang lebih

operasional melalui studi lapangan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau strategis di Indonesia. Dengan demikian, efektivitas pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dalam memperkuat keamanan maritim dapat diukur secara empiris dan menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Informasi Geospasial. (2023). *Informasi geospasial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Cibinong: BIG.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Bakamla RI.
- Bateman, S. (2019). *Maritime security governance in the Indo-Pacific*. Singapore: RSIS. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164.
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2024). *Understanding Maritime Security*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Food and Agriculture Organization. (2024). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024*. Rome: FAO.
- International Maritime Organization. (2023). *Maritime security and facilitation*. London: IMO.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024*. Jakarta: KKP RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- OECD. (2020). *The Governance of Critical Risks*. Paris: OECD Publishing.
- Till, G. (2018). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century* (4th ed.). London: Routledge.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Review of Maritime Transport 2024*. Geneva: United Nations. ([UNIDIR → Building a more secure world.](#))
- United Nations Convention on the Law of the Sea. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Montego Bay: United Nations. ([International Maritime Organization](#))
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- World Bank. (2023). *Connecting to Compete 2023: Trade Logistics in the Global Economy*. Washington, DC: World Bank.
- Bueger, C. (2024). *Securing the Seas: Maritime Security Governance*. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR). ([UNIDIR → Building a more secure world.](#))